



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DKIPS
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TRIWULAN I

TAHUN 2026



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DKIPS
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TRIWULAN I TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Penyusunan laporan ini mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I, yang terintegrasi antara capaian kinerja, realisasi anggaran, serta kemajuan pelaksanaan rencana aksi pada setiap level sasaran strategis, outcome program, hingga kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja pada Triwulan I masih berada pada tahap awal pelaksanaan, dengan realisasi anggaran sebesar kurang lebih 10,94 persen dari total pagu. Capaian ini didominasi oleh pelaksanaan kegiatan rutin dan administratif, sementara kegiatan strategis yang berdampak langsung terhadap indikator kinerja utama sebagian besar masih dalam tahap persiapan dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Perlu disampaikan bahwa indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan sebagian indikator outcome program menggunakan pendekatan indeks komposit, sehingga tidak dapat diukur secara parsial pada setiap triwulan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Triwulan I lebih difokuskan pada capaian output kegiatan sebagai indikator antara yang mendukung pencapaian target kinerja tahunan. Meskipun demikian, beberapa indikator outcome telah menunjukkan progres awal yang cukup baik, yang mencerminkan adanya efektivitas pelaksanaan kegiatan pada tahap awal.

Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya terkait percepatan realisasi kegiatan strategis, pemerataan penyerapan anggaran, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan percepatan kinerja pada triwulan berikutnya, sehingga target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik di Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 06 April 2026

Dr. SUANDI, S.Ti., M.Si
KEPALA DKIPS PROV. SULTENG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan I Tahun 2026 dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi kinerja secara berkala pada periode Januari sampai dengan Maret 2026. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan triwulanan ini merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Pada Triwulan I Tahun 2026, laporan ini memuat gambaran awal pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis perangkat daerah, antara lain peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik, peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan pengelolaan statistik sektoral dan data geospasial, serta peningkatan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah. Pelaksanaan pada tahap awal tahun difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui penyusunan konten dan relasi media, pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika serta infrastruktur digital, pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral dan penyelenggaraan fungsi walidata, serta penguatan kebijakan dan layanan keamanan informasi dan persandian.

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas capaian kinerja pada periode awal tahun, sekaligus sebagai alat kendali manajemen untuk mendorong peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian

dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

Pelaksanaan kinerja pada triwulan ini juga menjadi instrumen untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan maupun kendala awal pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan prioritas seperti penguatan SPBE, pengelolaan informasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral berbasis Satu Data Indonesia, serta peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah. Dengan pendekatan tersebut, LAKIP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan, tetapi juga sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan digital, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

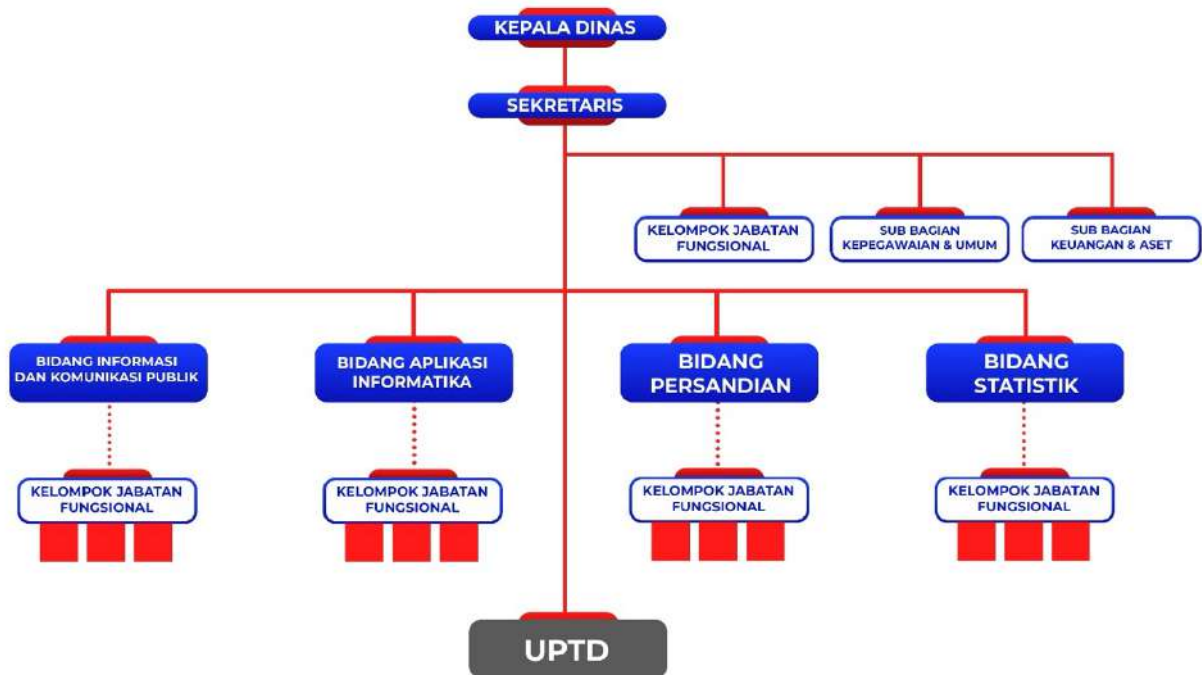
Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relative kurang memadai apa bila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Januari 2026, jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak orang yang terbagi dalam 5 bagian terdiri dari :

- Jabatan Struktural : 8 Orang
- Jabatan Fungsional : 13 Orang
- Staf ASN : 83 Orang
- Honorer/PHL : 21 Orang
- Tenaga Ahli : 3 Orang

Dari jumlah pegawai sebanyak 125 orang ASN dan Non ASN dan Tenaga Ahli Sebanyak 3 Orang, Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan menganalisa kondisi pegawai sebagai OPD teknis yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
DINAS DAERAH TIPE A
(PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022)**



1.2 PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS

Isu Strategis

Kondisi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini dihadapkan pada permasalahan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Belum Berkualitas seperti :

a. Tata Kelola Pengelolaan Layanan Informasi Publik Belum Optimal :

- Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Komisi Informasi Belum Optimal;
- Pengelolaan PPID Utama Provinsi Dan PPID Pelaksana Dan Pemanfaatannya Sebagai Media Layanan Informasi Publik Belum Optimal;
- Pembinaan Terhadap Pengelolaan PPID Utama Kab/Kota Belum Optimal;
- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Informasi Publik Belum Optimal;
- Pengelolaan Dan Pemanfaatan Media Informasi Belum Optimal;

- Kapasitas Dan Kompetensi SDM Pengelola Informasi Masih Rendah.
- Tata Kelola Layanan Aduan Masyarakat Belum Optimal
- Survey Kepuasan Layanan Pengaduan Berbasis Elektronik Belum Maksimal;
- Perangkat Layanan Informasi Belum Maksimal;
- Penguatan Regulasi Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Belum Optimal.
- Adanya Efisiensi Anggaran Tahun 2026 menyebabkan beberapa kegiatan Teknis Pendukung Capaian Kinerja Program Dinas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Penyelenggaraan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal :

- Kebijakan internal dan Pedoman pelaksanaan SPBE belum optimal;
- Tim Koordinasi SPBE Belum Optimal;
- Manajemen Aset TIK belum optimal;
- Manajemen Layanan SPBE Belum tersedia;
- Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola TIK Belum Optimal;
- Layanan Pusat Data Belum Optimal (belum semua sistem tersimpan dan terintegrasi pada Pusat Data DKIPS);
- Layanan Jaringan Intra Pemerintah Belum optimal (Belum semua UPT, SMA/SMK terhubung dengan jaringan fiber optik);
- Manajemen Pengetahuan TIK Belum Optimal
- Belum adanya layanan administrasi pemerintah daerah yang terhubung dengan Sistem Layanan Penghubung Pemerintah (SPLP)
- Penerapan Aspek Domain Manajemen masih belum mengacu kepada Peta Rencana
- Penerapan Aspek Audit TIK belum dilakukan sesuai dengan Peta Rencana
- Adanya Efisiensi Anggaran Tahun 2026 menyebabkan beberapa kegiatan Teknis Pendukung Capaian Kinerja Program Dinas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Indeks Pengamanan Informasi Masih Dalam Kategori Sangat Kurang:

- Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi Belum Optimal (Tidak Layak)
- Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Belum Optimal
- Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Belum Optimal
- Pengamanan Sistem Elektronik Dan Pengamanan Informasi Non elektronik Belum Optimal
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Belum Optimal
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal (Sangat Kurang)
- Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Belum Optimal
- Belum Tersedia Peraturan/Keputusan Instansi Pemerintah
- Identifikasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal
- Analisa Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal
- Monitoring Dan Evaluasi – Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Belum Optimal (Sangat Kurang)
- Tingkat Pemahaman dan Kesadaran OPD Terhadap Pentingnya Keamanan Informasi Masih Rendah
- Adanya Efisiensi Anggaran Tahun 2026 menyebabkan beberapa kegiatan Teknis Pendukung Capaian Kinerja Program Dinas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

d. Tata Kelola Penyelenggaraan Sulteng Satu Data Indonesia Belum Optimal :

- Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral dari Produsen Data/Perangkat Daerah (PD) Masih Manual;
- Kualitas Data Sektoral dari Perangkat Daerah Belum Sesuai Standar SDI;
- Cakupan Perangkat Daerah yang Mengumpulkan Data Sektoral masih Kurang;
- Kapasitas SDM Pengumpul dan Pengolah Data pada Produsen Data/Perangkat Daerah Masih Rendah;
- Kapasitas dan Sinergitas Forum SDI Sulteng Belum Optimal;
- Publikasi Informasi atas Hasil Pengolahan Data Sektoral Belum Optimal;

- Pemanfaatan Data Sektoral oleh Perangkat Daerah untuk Perencanaan dan MONEV Belum Optimal.
- Adanya Efisiensi Anggaran Tahun 2026 menyebabkan beberapa kegiatan Teknis Pendukung Capaian Kinerja Program Dinas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II

PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2030, Tahun 2026 merupakan tahun awal implementasi penuh dokumen perencanaan perangkat daerah dalam kerangka Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Berbeda dengan Tahun 2025 yang merupakan masa transisi, pada Tahun 2026 seluruh indikator kinerja, sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan telah mengacu secara utuh pada dokumen perencanaan yang baru. Kondisi ini memberikan arah yang lebih jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk menjamin kesinambungan perencanaan, keselarasan dengan visi dan misi kepala daerah, serta keterpaduan antara target pembangunan jangka menengah daerah dengan prioritas pembangunan sektor komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik pada periode perencanaan 2025–2029.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam urusan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2030. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program prioritas, antara lain peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi dan infrastruktur digital, penguatan penyelenggaraan statistik sektoral dan implementasi Satu Data Indonesia, serta peningkatan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa visi dan misi perangkat daerah harus mengacu dan selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam kerangka perencanaan kinerja Tahun 2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik telah menetapkan sasaran strategis yang terukur melalui indikator kinerja utama, seperti peningkatan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, peningkatan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Indeks Pembangunan Statistik, serta peningkatan Indeks Keamanan Informasi pemerintah daerah. Sasaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan

terukur, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Tahun 2026, sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi secara akuntabel dan berkelanjutan.

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.1 Tujuan

Tujuan strategis Diskominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah dalam Renstra yaitu **”Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel”** dengan indikator tujuan sesuai Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 yaitu :

- **Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Indeks Pemerintahan digital)**
- **Indeks keterbukaan informasi publik (IKIP)**

2.1.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif
2. Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang berkualitas
3. Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 memiliki 1 indikator :
 - Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)
- 2) Sasaran 2 memiliki 4 indikator yang berakhir di Tahun 2025 yakni :
 - Domain Layanan SPBE
 - Domain Manajemen SPBE

- Domain Tata Kelola SPBE
- Domain Kebijakan Internal SPBE

Ke-empat indikator diatas kemudian dikonversi menjadi satu indikator yakni **Tingkat Kematangan Pemerintah Digital (Pemdi)** yang berlaku di Tahun 2026 - 2029

- 3) Sasaran 3 memiliki 1 indikator :
 - Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)
- 4) Sasaran 4 memiliki 1 indikator :
 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

TABEL 2.1

**INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN, INDIKATOR OUTCOME, INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
RENSTRA DKIPS PERIODE 2025-2029**

RENSTRA 2025 – 2029									
N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Dasar 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE dan Keterbukaan		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Indeks Pemerintahan digital)	2,91	3,15	1,20	1,50	1,70	2,00
	Informasi Publik Dalam Mendukung		Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	82,16	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks)	62,76	64	69	74	80	85
		Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Domain Layanan SPBE (Poin)	3,49	3,60	3,75	4,00	4,25	4,50
			Domain Manajemen SPBE (Poin)	1,36	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50
			Domain Tata Kelola SPBE (Poin)	2,60	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
			Domain Kebijakan Internal SPBE (Poin)	3,40	3,50	3,75	4,00	4,00	4,00
			Tingkat Kematangan	-	-	30	40	50	60

RENSTRA 2025 – 2029									
N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Dasar 2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Penyelenggaraan Pemerintah Digital (Pemdi) (%)						
		Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	1,77	2,0	2,0	2,23	2,3	2,5
		Meningkatnya Kualitas Persandian dan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	433	400	404	480	600	650

PERJANJIAN KINERJA

***Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026***

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Layanan SPBE	3,75 Poin
		Domain Manajemen SPBE	2,50 Poin
		Domain Tata Kelola SPBE	3,25 Poin
		Domain Kebijakan Internal SPBE	3,75 Poin
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks)	69 Indeks
3	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	404 Indeks
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2,00 Indeks

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 menggambarkan komitmen pencapaian kinerja organisasi yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan digital, keterbukaan informasi publik, serta pengelolaan statistik sektoral dan keamanan informasi. Secara substansial, dokumen ini memuat keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta dukungan alokasi anggaran pada masing-masing program.

Sasaran strategis pertama, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang Berkualitas, ditargetkan melalui capaian beberapa domain utama, yakni Domain Layanan

SPBE sebesar 3,75 poin, Domain Kebijakan SPBE sebesar 4,25 poin, serta Domain Tata Kelola SPBE sebesar 3,75 poin. Target ini menunjukkan arah kebijakan yang menitikberatkan pada penguatan regulasi, peningkatan kualitas layanan digital, serta integrasi tata kelola SPBE. Dukungan terhadap sasaran ini terutama tercermin dalam Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.291.757.220, yang berperan strategis dalam pengembangan aplikasi, integrasi sistem, dan peningkatan layanan digital pemerintah daerah.

Sasaran strategis kedua, yaitu Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi, diukur melalui Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Sandi dengan target 48 (indeks) serta Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebesar 400. Hal ini menunjukkan fokus pada aspek keamanan informasi sebagai fondasi utama transformasi digital pemerintahan. Dukungan anggaran terhadap sasaran ini dialokasikan melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp97.976.000. Meskipun relatif kecil dibandingkan program lainnya, anggaran ini memiliki peran krusial dalam menjaga keandalan dan keamanan sistem informasi pemerintahan.

Sasaran strategis ketiga, yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, ditargetkan melalui capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 4,01. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.093.300.050, yang diarahkan pada penguatan diseminasi informasi publik, pengelolaan media komunikasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Sasaran strategis keempat, yaitu Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral, diukur melalui Indeks Penyelenggaraan Statistik sebesar 3,00. Sasaran ini sejalan dengan implementasi prinsip Satu Data Indonesia, yang menuntut ketersediaan data yang berkualitas, terstandar, dan terintegrasi. Dukungan terhadap sasaran ini diberikan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar

Rp500.000.000. Anggaran ini diarahkan untuk penguatan tata kelola data, peningkatan kualitas statistik sektoral, serta koordinasi walidata.

Selain program-program teknis tersebut, terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.914.295.169 yang berfungsi sebagai pendukung operasional organisasi secara keseluruhan, termasuk administrasi perkantoran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Secara keseluruhan, struktur Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menunjukkan adanya keterkaitan yang cukup kuat antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan dukungan anggaran. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, antara lain proporsi anggaran yang relatif terbatas pada program persandian dan statistik sektoral dibandingkan dengan kompleksitas target yang ingin dicapai. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan anggaran, peningkatan sinergi lintas perangkat daerah, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar target indikator kinerja dapat tercapai secara efektif pada tahun berjalan.

***Tabel Alokasi Anggaran per Program
Dinas Kominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026***

No	Program	Anggaran	Ket.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 10.914.249.516,49	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 7.079.300.050	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp.11.291.173.922	APBD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 50.000.000	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 97.976.000	APBD
	Jumlah	Rp. 29.432.699.488,49	

2.2 CAPAIAN KINERJA

a. Capaian Kinerja Strategis

**Tabel Target dan Capaian Kinerja Diskominfoantik
Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2026			Capaian %
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Layanan SPBE (Poin)	3,75	-	-	-
		Domain Manajemen SPBE (Poin)	2,50	-	-	-
		Domain Tata Kelola SPBE (Poin)	3,25	-	-	-
		Domain Kebijakan Internal SPBE (Poin)	3,75	-	-	-
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks)	69,00	-	-	-
3	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	404,00	-	-	-
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2,00	-	-	-

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, terlihat bahwa seluruh indikator pada tingkat sasaran strategis belum memiliki realisasi (ditandai dengan tanda “-”). Kondisi ini bukan menunjukkan tidak adanya kinerja, melainkan disebabkan oleh karakteristik indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan, yaitu berbasis indeks komposit, sehingga secara metodologis tidak dapat diukur secara parsial per triwulan.

Indikator-indikator seperti Domain SPBE (Layanan, Manajemen, Tata Kelola, dan Kebijakan Internal), Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Indeks Keamanan Informasi (KAMI), serta Indeks Pembangunan Statistik merupakan indikator makro yang disusun berdasarkan hasil penilaian komprehensif terhadap berbagai komponen/variabel yang diukur secara periodik (umumnya tahunan). Dengan demikian, capaian indikator tersebut tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk progres triwulanan secara linier.

Secara konseptual, masing-masing indeks memiliki formulasi sebagai berikut:

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Pemerintah Digital)

Indeks ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan pendekatan domain, yaitu:

- Domain Kebijakan Internal
- Domain Tata Kelola
- Domain Manajemen
- Domain Layanan

Setiap domain terdiri dari sejumlah indikator yang dinilai berdasarkan bukti dukung (*evidence based*). Nilai indeks merupakan agregasi skor dari seluruh indikator dengan pembobotan tertentu. Oleh karena itu, nilai SPBE baru dapat dihitung setelah:

- seluruh indikator terpenuhi,
- dokumen eviden lengkap,
- dan dilakukan evaluasi eksternal.

Dengan demikian, capaian triwulanan tidak dapat dihitung karena nilai indeks bukan hasil akumulasi progres waktu, melainkan hasil evaluasi menyeluruh pada satu titik waktu.

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP)

Indeks ini mengukur kualitas pengelolaan komunikasi publik melalui beberapa dimensi seperti:

- ketersediaan informasi,
- kualitas diseminasi,

- efektivitas komunikasi,
- dan keterlibatan publik.

Penilaian dilakukan melalui instrumen evaluasi yang bersifat komprehensif dan berbasis survei serta verifikasi dokumen. Nilai indeks tidak dibentuk dari penjumlahan capaian triwulan, tetapi dari **hasil pengukuran menyeluruh terhadap kinerja komunikasi publik dalam periode tertentu (tahunan)**.

Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi organisasi berdasarkan standar tertentu (mengacu pada ISO 27001). Komponen penilaian meliputi:

- tata kelola keamanan informasi,
- manajemen risiko,
- kerangka kerja keamanan,
- pengelolaan aset informasi,
- dan teknologi keamanan.

Nilai indeks diperoleh melalui asesmen mandiri dan/atau evaluasi eksternal yang dilakukan secara periodik. Dengan karakteristik tersebut, indeks ini tidak dapat diukur secara triwulanan karena **memerlukan pemenuhan seluruh kontrol dan evaluasi menyeluruh atas sistem keamanan informasi**.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia, dengan komponen antara lain:

- kelembagaan statistik,
- proses bisnis statistik,
- kualitas data,
- dan pemanfaatan data.

Penilaian dilakukan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh BPS. Nilai indeks merupakan hasil agregasi dari seluruh aspek tersebut, sehingga **tidak dapat direpresentasikan sebagai capaian parsial triwulan**.

Implikasi terhadap Capaian Triwulan I

Tidak adanya realisasi pada kolom Triwulan I tidak mencerminkan nihilnya pelaksanaan program/kegiatan, melainkan menunjukkan bahwa:

- indikator yang digunakan bersifat **lagging indicator (indikator hasil akhir)**,
- capaian baru dapat diukur setelah seluruh proses berjalan,
- dan penilaian dilakukan oleh lembaga evaluator eksternal pada periode tertentu.

Sementara itu, progres kinerja pada Triwulan I sesungguhnya telah berjalan dan dapat dilihat melalui:

- capaian output kegiatan (misalnya jumlah dokumen, layanan, sistem yang dibangun),
- realisasi anggaran,
- serta pelaksanaan rencana aksi pada masing-masing program.

Dengan kata lain, capaian triwulan lebih tepat diukur pada level **indikator antara (output/outcome antara)**, bukan pada indikator sasaran strategis berbasis indeks.

b. Capaian Kinerja Program

**Tabel Capaian Kinerja Program Dinas Kominfoantik
Triwulan I Tahun 2026**

No	Sasaran Outcome	Indikator Outcome	Tahun 2026			Capaian %
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	15 %	10%	9%	90 %
II	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Implementasi Inovasi Provinsi Cerdas	23%	-	-	-
		Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Di Pemerintah Provinsi	3 Poin	-	-	-
		Nilai Tingkat Kematangan	4 Poin	1 Poin	1 Poin	100 %

No	Sasaran Outcome	Indikator Outcome	Tahun 2026			Capaian %
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	
1	2	3	4	5	6	7
		Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi				
		Nilai Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	3 Poin	-	-	-
III	Meningkatnya Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	44 %	-	-	-
IV	Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100 %	25 %	25 %	100 %
		Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	55 %	-	-	-
V	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfoantik	70 Indeks	-	-	-

Berdasarkan tabel capaian kinerja outcome program Triwulan I Tahun 2026, terlihat bahwa sebagian indikator outcome telah menunjukkan progres awal, meskipun secara umum capaian masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan karakteristik indikator outcome yang merupakan turunan dari indikator kinerja utama (IKU) berbasis indeks, sehingga pencapaiannya sangat bergantung pada akumulasi pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun.

Pada sasaran outcome *Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah*, indikator persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik menunjukkan capaian sebesar 9% dari target triwulan sebesar 10% atau sekitar 90%. Capaian ini tergolong cukup baik pada Triwulan I, mengingat sebagian besar kegiatan strategis komunikasi publik seperti produksi konten, Kerjasama media, dan event publik masih direncanakan pada triwulan berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa fondasi awal pelaksanaan komunikasi publik telah berjalan, meskipun

masih memerlukan penguatan pada aspek intensitas dan jangkauan diseminasi informasi.

Pada sasaran outcome *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika*, terdapat indikator yang telah menunjukkan capaian optimal, yaitu nilai tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah provinsi yang mencapai target triwulan sebesar 1 poin atau 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa aspek infrastruktur jaringan yang menjadi tulang punggung SPBE telah berjalan sesuai rencana. Namun demikian, indikator lainnya seperti peningkatan implementasi inovasi provinsi cerdas, tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE, serta kematangan sistem penghubung layanan belum memiliki capaian pada triwulan ini. Kondisi ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis dan kompleks, seperti integrasi aplikasi dan pengembangan sistem, yang umumnya dijadwalkan pada triwulan berikutnya.

Pada sasaran outcome *Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah*, indikator persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi belum menunjukkan capaian pada Triwulan I. Hal ini disebabkan oleh proses pengukuran yang memerlukan pemenuhan berbagai aspek, seperti kebijakan, infrastruktur, dan implementasi kontrol keamanan, yang tidak dapat dinilai secara parsial dalam satu triwulan. Selain itu, kegiatan pendukung seperti penyusunan kebijakan dan sosialisasi keamanan informasi sebagian besar direncanakan pada Triwulan II.

Selanjutnya, pada sasaran outcome *Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional*, kedua indikator yang ada, yaitu persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, belum menunjukkan capaian pada Triwulan I. Hal ini mencerminkan bahwa proses pemanfaatan data statistik sektoral masih dalam tahap awal, khususnya pada aspek pengumpulan data, validasi, dan koordinasi antar perangkat daerah. Mengingat indikator ini membutuhkan perubahan perilaku penggunaan data oleh perangkat daerah, maka capaian umumnya baru akan terlihat pada pertengahan hingga akhir tahun.

Pada sasaran outcome *Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah*, indikator Indeks Reformasi Birokrasi juga belum

dapat diukur pada Triwulan I. Hal ini disebabkan oleh metode pengukuran indeks yang dilakukan secara periodik dan komprehensif, serta membutuhkan akumulasi pelaksanaan berbagai komponen reformasi birokrasi sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, capaian outcome program pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan pola umum, yaitu:

1. Indikator yang bersifat kuantitatif langsung (seperti persentase jangkauan informasi) mulai menunjukkan progres;
2. Indikator yang berbasis tingkat kematangan tertentu dapat dicapai secara parsial apabila memiliki target antara;
3. Indikator yang bersifat sistemik dan berbasis indeks belum dapat diukur pada tahap awal.

Dengan demikian, meskipun sebagian besar indikator belum menunjukkan capaian, kondisi ini tidak mencerminkan rendahnya kinerja, melainkan menunjukkan bahwa proses pembangunan kinerja masih berada pada tahap fondasi. Oleh karena itu, fokus pada triwulan berikutnya perlu diarahkan pada percepatan implementasi kegiatan inti, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas output sebagai dasar pencapaian outcome dan indikator kinerja utama pada akhir tahun.

c. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan evaluasi capaian kinerja pada level yang lebih operasional, yaitu kegiatan dan sub kegiatan. Evaluasi ini menjadi penting mengingat indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan outcome program sebagian besar bersifat indeks dan tidak dapat diukur secara triwulanan, sehingga pengukuran kinerja pada Triwulan I lebih difokuskan pada capaian output sebagai representasi progres pelaksanaan program. Melalui pengukuran ini, dapat diketahui sejauh mana implementasi rencana aksi telah dilaksanakan, tingkat penyerapan anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, analisis capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan Triwulan I Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai efektivitas pelaksanaan program sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan langkah percepatan dan

perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya seperti yang ditampilkan pada Tabel Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2026 dibawah ini :

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					29.432.699.488, 49		7.503.703.054,44		3.220.435.661, 00		43%	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfos antik	Indeks	70	10.914.249.516, 49		3.465.783.054,44		1.906.927.113, 00		1	
	Tersedianya Laporan Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	-		-	-	-			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	-	1,00		1,00	-	100		
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	-			-				
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah	Data	113	-	25,0 0		27,0 0	-	108		

N o	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah										
	Terselenggara ya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	-							
	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	1	9.183.658.391,5 0		2.622.312.509,44		1.856.927.113, 00		71 %	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Ora ng/ Bul an	9.021.898.391,5 0	104, 00	2.570.622.509,44	104, 00	1.835.087.113, 00	100	71 %	
	Tersedianya	Jumlah	Dokumen	1							60%	

N o	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			146.760.000,00		36.690.000,00	-	21.840.000,00			
	Tersedianya Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	15.000.000,00		15.000.000,00	-	-			
	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi , pemanfaata n dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	-				-			

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	-							
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	-							
	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaia n pada Perangkat Daerah	Laporan	1	69.335.000,00		25.000.000,00		-			
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	-				-			

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	69.335.000,00		25.000.000		-			
	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah	Laporan	1	283.567.713,99		130.098.045,00		-			
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.076.115,00	-	-		-			
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	63.796.170,00		36.600.045		-			
	Tersedianya Barang	Jumlah Paket Barang	Paket	1	13.005.748,99		6.500.000					

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan										
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	201.689.680,00		86.998.000					
	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	Laporan	1	256.869.341,00		118.512.500,00		-			
	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	256.869.341,00		118.512.500		-			

N o	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan ketersediaa n jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah	Laporan	1	738.560.370		461.300.000		-			
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	339.360.370,00		78.100.000					
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	399.200.000,00		383.200.000					
	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaaa n barang milik daerah	Laporan	1	382.258.700,00		108.560.000,00		50.000.000,00			

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	penunjang urusan pemerintahan daerah	penunjang urusan pemerintaha n daerah										
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30	270.496.700,00	5	50.000.000	5	50.000.000	100	1	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	195	71.610.000,00		58.560.000					
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	40.152.000,00		-					

N o	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Jangkauan Dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	15	7.079.300.050,00	10	1.965.060.000,00	9	511.625.000,00	90	0	
	Tersedianya Dokumen Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi	Dokumen	1	7.079.300.050,00		1.965.060.000,00		511.625.000,00			

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	1	5.513.212.500,00		1.359.920.000,00				-	Rencana TW II, TW III dan TW IV PEMBUATAN VIDEO EKSPEDISI DAN DOKUMENTER TERKAIT PROGRAM 9 BERANI PENYELENGGARAAN EVENT BERANI CERDAS DAN BERANI SEHAT JASA PEMBUATAN KONTEN MEDIA SOSIAL/REELS TERKAIT PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	160	58.818.000,00	50	15.680.000	30	-	60	-	PELAKSANA AN PROGRAM BERANI LITERASI INFORMASI
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	10	-							
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	80	-	20		9	-	45		
	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	50	-	20		9		45		

N o	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	2	-							
	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	1	783.600.200,00		223.935.000	-	146.100.000,0 0		1	
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendisemina sikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	5	658.000.000,00		365.525.000,00	-	365.525.000,0 0		1,00	DANA HIBAH KPID
	Terlaksananya	Jumlah	Rekomendasi	1								

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			65.669.350,00		-					
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	27	-	10,00	-	11,00		110		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Implementasi Inovasi Provinsi Cerdas	Persen	23	11.291.173.922,00		2.061.160.000,00		794.083.548,00			
		Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi	Level	3								

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		SPBE Di Pemerintah Provinsi										
		Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubun g Layanan Pemerintah	Level	3								
		Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	4		1		1		100		
	Tersedianya Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggar aan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggar aan Pemerintah Daerah	Laporan	1	627.274.400,00		-		-			
	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan	Dokumen	1	627.274.400,00	1	-	1		100		Penambahan Infrastruktur Penunjang pengelolaan Domain dan

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggara an Pemerintah Daerah	Sub Domain Pemerintah Daerah										Sub Domain
	Tersedianya Laporan Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Kematangan Pembangun an Aplikasi SPBE Pemerintah Provinsi	Laporan	1	10.663.899.522, 00		2.061.160.000,00		794.083.548,0 0			
	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	2	233.878.122,00	-	-					
	Terlaksananya Penyelenggara n Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	4	140.200.000,00	2	25.200.000	2	16.800.000	100	1	

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Daerah										
	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	1	4.080.634.400,00	1	237.000.000	1	126.000.000	100	1	Penambahan Infrastrukur Penunjang Pusat Kendali
	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah/UPTD/Cabang Dinas	59	5.685.457.000,00	59	1.421.260.000	112	651.283.548,00	189,831	0	TW III DIRENCANAKAN AKAN DILAKSANAKAN Penyediaan akses internet di mesjid Raya
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	59	523.730.000,00	59	377.700.000	112	-	189,831	-	TW III DIRENCANAKAN AKAN DILAKSANAKAN Fasilitas Jaringan VPN Kabupaten Bangkep, Balut, Kota Palu
	Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan	Persentase Organisasi Perangkat	Persen	100	50.000.000,00	25	-	25	-	100		

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Standardisasi Dalam Penyelenggaran Sistem Statistik Nasional (SSN)	Daerah Yang Menggunakan an Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaaa n Pembangunan an Daerah (%)										
		Persentase OPD Yang Menggunakan an Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan an Daerah	Persen	55		-		-				
	Tersedianya Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Pemanfaata n Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaaa n	Laporan	1	50.000.000,00		-		-			

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembangun an daerah										
	Tersedianya Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan OPD yang menggunak an Data Statistik dalam Evaluasi pembangun an daerah	laporan	1								
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	48								
	Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Persentase	73	25.115.000,00	-	-					TW II AKAN DILAKSANAK AN '1. kegiatan Bimtek Informasi Geospasial 2. Sisa anggaran akan digeser ke sub kegiatan

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral TW IV Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana
	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Persen	70	-							
	Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan	4	24.885.000,00	-	-					TW II AKAN DILAKSANAKAN 1. kegiatan penilaian EPSS pada bulan Mei 2026 2. Evidens Indikator Sukb

N o	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Kegiatan akan dipenuhi di TW II dengan berkoordinasi pada Sekretariat Satu Data (BAPPEDA) TW IV AKAN DILAKSANAKAN Reviu Hasil EPSS terkait penentuan OPD Sampel Penilaian
	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persen	18	-							

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persen	44	97.976.000		11.700.000		7.800.000		1	
	Tersedianya Laporan Peningkatan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Laporan	1	94.176.000,00		11.700.000,00		7.800.000,00		1	

N o	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai Panduan dalam menjalankan Penyelenggaraan Persandian	Dokumen	3	3.800.000,00	-	-					TW II DIRENCAKAN PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN INTERNAL SMKI

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronikdan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintaha n Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	2								
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunaka n Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	3	12.874.000,00	-	-					TW II DIRENCANA KAN PELAKSANA AN ZOOM SOSIALISASI PENERAPAN TTE DI BULAN MEI YANG MENYASAR SEKOLAH (SMA)
	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian	Laporan	2	77.502.000,00		11.700.000	-	7.800.000		1	TW III DIRENCANA KAN AKAN DILAKSANAK AN BIMTEK INDEKS KAMI

N O	SASARAN PROG/KEG/SU BKEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUBKEG	SATUAN	TARGET TAHUN 2026		TARGET TRIWULAN I		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN				KETERANG AN
								REALISASI TRIWULAN I		CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan										
	Tersedianya Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Laporan	1	3.800.000,00		-		-			
	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiatan	5	3.800.000,00	-	-					TW IV DIRENCANAKAN AKAN DILAKSANAKAN SOSIALISASI PHKS VIA ZOOM
JUMLAH					29.432.699.488,49		7.503.703.054,44		3.220.435.661,00			

Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi kinerja dan anggaran pada tabel Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2026, diketahui bahwa total realisasi anggaran mencapai sekitar **Rp3,22 miliar dari total pagu ± Rp29,43 miliar**, atau sekitar **10,94%**. Persentase ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada level kegiatan dan sub kegiatan masih berada pada tahap awal (early stage), yang secara umum didominasi oleh pelaksanaan kegiatan rutin, administratif, dan persiapan teknis.

Jika dikaitkan dengan capaian indikator sasaran strategis dan outcome sebelumnya yang sebagian besar belum dapat diukur secara triwulan (karena berbasis indeks), maka capaian pada level kegiatan dan sub kegiatan ini menjadi indikator utama dalam menilai progres kinerja organisasi pada Triwulan I.

Pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, realisasi anggaran memberikan kontribusi terbesar terhadap total capaian Triwulan I. Hal ini terutama berasal dari sub kegiatan **penyediaan gaji dan tunjangan ASN** yang terealisasi secara rutin setiap bulan. Selain itu, beberapa sub kegiatan seperti administrasi keuangan, administrasi umum, serta penyediaan jasa penunjang juga telah menunjukkan realisasi. Dengan demikian, capaian program ini relatif stabil dan menjadi penopang utama persentase realisasi anggaran secara keseluruhan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kontribusi kegiatan ini lebih bersifat **supporting system**, sehingga dampaknya terhadap indikator outcome strategis seperti reformasi birokrasi masih belum signifikan pada tahap ini.

Pada **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**, realisasi anggaran pada Triwulan I tercatat sekitar **Rp511 juta dari total lebih dari Rp7 miliar** (sekitar 7–8%). Realisasi ini terutama berasal dari kegiatan awal seperti penyusunan dokumen, perencanaan komunikasi, dan sebagian produksi konten. Sementara itu, kegiatan strategis dengan nilai anggaran besar seperti relasi media, event publikasi, dan kampanye komunikasi belum terealisasi karena dijadwalkan pada Triwulan II dan III. Meskipun demikian, capaian outcome yang mencapai sekitar 90% dari target triwulan

menunjukkan bahwa efektivitas awal kegiatan sudah cukup baik, meskipun masih bersifat terbatas dari sisi jangkauan.

Pada **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**, realisasi anggaran Triwulan I sekitar **Rp794 juta dari total ± Rp11,29 miliar** (sekitar 7%). Realisasi ini berasal dari kegiatan awal seperti koordinasi SPBE, pengelolaan domain, serta operasional awal pusat kendali. Sementara itu, kegiatan utama seperti:

- penyediaan akses internet (± Rp5,6 miliar),
- pengembangan jaringan intra,
- integrasi aplikasi SPBE,

belum terealisasi karena dijadwalkan pada Triwulan III. Kondisi ini menunjukkan adanya **gap waktu pelaksanaan yang cukup besar**, yang berpotensi menimbulkan risiko penumpukan pekerjaan dan anggaran di akhir tahun. Meskipun demikian, capaian indikator antara seperti kematangan layanan jaringan intra yang telah mencapai target menunjukkan bahwa fondasi teknis sudah mulai terbentuk.

Pada **Program Penyelenggaraan Statistik Sektor**al, realisasi anggaran masih sangat rendah, bahkan mendekati nol pada Triwulan I. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar kegiatan seperti:

- peningkatan kualitas statistik,
- koordinasi forum satu data,
- evaluasi penyelenggaraan statistik (EPSS),

baru direncanakan pada Triwulan II dan seterusnya. Kondisi ini berdampak langsung pada belum adanya capaian indikator outcome terkait pemanfaatan data statistik oleh perangkat daerah. Jika tidak dilakukan percepatan, maka terdapat risiko keterlambatan pencapaian target indeks statistik pada akhir tahun.

Pada **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**, realisasi anggaran Triwulan I sangat terbatas, yaitu sekitar **Rp7,8 juta dari total ± Rp97 juta** (kurang dari 10%). Realisasi ini masih bersifat administratif, sementara kegiatan strategis seperti:

- penyusunan kebijakan keamanan informasi,
- sosialisasi sistem manajemen keamanan informasi,
- peningkatan kapasitas keamanan siber,

baru akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keamanan informasi masih berada pada tahap awal, sehingga belum memberikan kontribusi terhadap capaian indikator outcome.

KESIMPULAN

Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih berada pada fase awal, dengan tingkat realisasi anggaran sekitar 10,94%. Meskipun demikian, kondisi ini masih dalam batas wajar dan sesuai dengan siklus pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.

Namun demikian, untuk memastikan ketercapaian indikator outcome dan sasaran strategis berbasis indeks pada akhir tahun, diperlukan:

- percepatan pelaksanaan kegiatan strategis mulai Triwulan II,
- pemerataan penyerapan anggaran,
- penguatan monitoring dan evaluasi berbasis rencana aksi,
- serta peningkatan kualitas output sebagai eviden penilaian indeks.

Dengan langkah tersebut, capaian kinerja yang saat ini masih bersifat administratif dan parsial dapat berkembang menjadi capaian outcome yang signifikan pada akhir Tahun 2026.

LAMPIRAN
BUKTI PENDUKUNG PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

TRIWULAN I
TAHUN 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. SUANDI, S.Ti.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. SUANDI, S.Ti.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660413 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Layanan SPBE	3,75 Poin
		Domain Manajemen SPBE	2,50 Poin
		Domain Tata Kelola	3,25 Poin
		Domain Kebijakan Internal SPBE	3,75 Poin
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	69 Indeks
3	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	404 Indeks
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,00 Indeks

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.914.249.516,49	APBD
2 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.079.300.050,00	APBD
3 Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.291.173.922,00	APBD
4 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50.000.000,00	APBD
5 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	97.976.000	APBD

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
 PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dr. SUANDI, S.Tl.M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660413 199803 1 003



**PERJANJIAN KINERJA 100 HARI KERJA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mendorong dan mewujudkan Program Prioritas 9 Berani Gubernur Sulawesi Tengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam 100 hari kerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. SUANDI, S.Ti., M.Si
NIP : 19660413 199803 1 003
Pangkat/Golongan : PEMBINA UTAMA MUDA/(IV/c)
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI
TENGAH

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si
Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyediakan data dan informasi sektoral yang terintegrasi dengan *Command Center* BERANI SAMPOROA, dengan prioritas keamanan, privasi, dan format terstandar.
2. Menjamin keamanan informasi dengan tidak memberikan data kepada PIHAK LAIN tanpa izin dan persetujuan tertulis dari pimpinan, segala bentuk penyalahgunaan atau kebijakan data akibat kelalaian, bersedia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah Indikator/Data Sektoral: - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Pemerintah Digital)(Indeks) - Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks) - Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks) - Domain Layanan SPBE (Poin) - Domain Manajemen SPBE (Poin) - Domain Tata Kelola SPBE (Poin) - Domain Kebijakan Internal SPBE (Poin) - Indeks Pembangunan Statistik (Indeks) - Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Data Sektoral <i>(Kepgub Daftar Data dan Data Prioritas Daerah)</i>	9 (Sembilan)
2	Persentase data Sektoral Bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik yang terintegrasi dengan <i>Command Center</i>	%	100%

- Melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menciptakan inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan mendorong daya saing daerah.
- Pemenuhan dokumen inovasi daerah Inovasi sesuai dengan syarat indikator Indeks Inovasi Daerah.
- Keterlibatan stakeholder inovasi daerah antara lain pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, komunitas, media masa dan publik figur.
- Mendaftarkan dan melaporkan inovasi daerah melalui aplikasi *Innovative Goverment Award* (IGA) yang difasilitasi oleh Badan Riset Inovasi Daerah Sulawesi Tengah selaku admin pemerintah daerah.
- Mendaftarkan inovasi ke Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Jumlah Inovasi yang tersedia dalam 100 Hari Kerja	Inovasi Daerah	1

- Menyiapkan sistem informasi digital untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan *Command Center* yaitu:
 - Aplikasi Satu Data
- Mendaftarkan sistem informasi digital ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Jumlah Aplikasi yang disiapkan dan terintegrasi dengan <i>Command Center</i>	Aplikasi	1

Pihak kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. SUANDI, S.Ti., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP: 19660413 199803 1 003



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dr. SUANDI, S.Ti., M.Si** jabatan **KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH** menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palu, 20 Februari 2026

Menyaksikan :
Gubernur Sulawesi Tengah,

DR. HANWAR HAFID, M.Si

Pembuat Pernyataan :

Dr. SUANDI, S.Ti., M.Si
NIP. 19660413 199803 1 003

NOTULEN

Hari/Tanggal: Terlampir : Kamis, 30 April 2026

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Diskominfo Provinsi Sulawesi Tengah

Agenda Rapat

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Realisasi Kinerja per Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2026.
2. Bukti Dukung (Output) Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran per Sub Kegiatan triwulan I Tahun 2026.
3. Rencana kerja masing-masing sub kegiatan per triwulan Tahun 2026.
4. Data Sektoral sebagai dasar pemenuhan indikator pada e-walidata Tahun 2026.

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Pada Triwulan I BELUM ADA REALISASI PERMOHONAN INFORMASI YANG MASUK/DITERIMA OLEH KI, pada Sub kegiatan ini tidak diambil akibat adanya efisiensi anggaran pada Tahun 2026.
Catatan : Pada Saat Pergeseran Anggaran diambil (Prioritas Nasional)
2. Pada Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik tidak diambil akibat adanya efisiensi anggaran pada Tahun 2026.
3. Pada Sub Kegiatan Diseminasi Informasi tidak diambil akibat adanya efisiensi anggaran pada Tahun 2026.
4. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Informasi tidak diambil akibat adanya efisiensi anggaran pada Tahun 2026.
Catatan : Pada Saat Pergeseran Anggaran diambil (Prioritas Nasional)
5. Pada Sub Kegiatan Relasi Media Pada Triwulan I adanya kerja sama antar media antara lain Tribun, Antara, Dailly Kota, Ayo Tau, Elsilindo, Netiz.ID, Ranstra News.id, Central Karya Kreatif, Sulteng Nambaso, RRI dan TVRI Sulawesi Tengah.
Catatan : Pembuatan Video Ekspedisi dan Dokumenter terkait 9 Berani, Penyelenggaraan Event Berani Cerdas dan Berani Sehat, Jasa Pembuatan Konten jasa media social/reels terkait kebijakan pemerintah daerah.
6. Pada Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
Catatan : Dana Hibah KPID.
7. Pada Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Tidak ada Rakor PPID sehingga Rekomendasi TIDAK ADA.
Catatan : Untuk TW I belum terlaksana nanti terlaksana pada TWII, III dan IV Tahun 2026 Monev, Span Laporan.
8. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Konten Tidak Terlaksana Pada TW I dan Pelaksanaan program Berani Literasi tingkat kematangan penyelenggaraan informasi pada TW II,III dan IV Tahun 2026.
Catatan : Tidak ada rakor PPID

9. Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
**Catatan : DIREKAP DAN DISERAHKAN BUKTI DUKUNG OLEH IBU
ANGGRAENI PADA RABU, 06 MEI 2026**

Pada tahun 2027 Wajib dimasukkan Sub Kegiatan :

- 1. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik**
- 2. Sosialisasi / diseminasi komunikasi, serta pengelolaan media komunikasi publik.**

NOTULEN

Hari/Tanggal: Terlampir : Kamis, 30 April 2026
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Diskominfo Provinsi Sulawesi Tengah

Agenda Rapat

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Realisasi Kinerja per Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2026.
2. Bukti Dukung (Output) Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran per Sub Kegiatan triwulan I Tahun 2026.
3. Rencana kerja masing-masing sub kegiatan per triwulan Tahun 2026.
4. Data Sektoral sebagai dasar pemenuhan indikator pada e-walidata Tahun 2026.

BIDANG PERSANDIAN

1. Pada Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.
Catatan : Sudah terealisasi pada Tahun 2025 pada TW IV melalui sosialisasi PHKS Via Zoo.
2. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
Catatan : 1 Laporan telah dikirim ke BSRE pada Bulan Mei Tahun 2026.
3. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Pada TW 1 Realisasi Anggaran Tenaga Ahli.
Catatan : Pada TW III melakukan BIMTEK Indeks KAMI.
4. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
Catatan : Melaksanakan via zoom mengenai sosialisasi penerapan mengenai TTE di bulan mei tahun 2026 ke sasaran kesekolah (SMA).
5. Pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
Catatan : Melaksanakan Sosialisasi kebijakan internal

Pada IKU INDEKS KAMI Telah dinilai pada tanggal 06-10 April 2026 oleh BSSN

NOTULEN

Hari/Tanggal: Terlampir : Kamis, 30 April 2026
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Diskominfo Provinsi Sulawesi Tengah

Agenda Rapat

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Realisasi Kinerja per Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2026.
2. Bukti Dukung (Output) Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran per Sub Kegiatan triwulan I Tahun 2026.
3. Rencana kerja masing-masing sub kegiatan per triwulan Tahun 2026.
4. Data Sektoral sebagai dasar pemenuhan indikator pada e-walidata Tahun 2026.

BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

1. Pada Sub Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
Catatan : Tidak Diambil akan tetapi untuk perubahan anggaran dimaksudkan sub kegiatan ini dan wajib dilaksanakan.
2. Pada Sub Kegiatan Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
Catatan : Tidak Diambil
3. Pada Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah.
Catatan : Tidak Diambil akan tetapi untuk perubahan anggaran dimaksudkan sub kegiatan ini dan wajib dilaksanakan.
4. Pada Sub Kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi.
Catatan : Untuk TW I dan 2 Tidak terlaksana dan akan terlaksana pada TW III dan Tw IV dengan adanya Fasilitasi Jaringan VPN Kabupaten Bangkep, Balut, Kota Palu.
5. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi sudah terlaksana pada TW I dengan 112 Perangkat/UPT/Cabang Dinas.
6. Pada Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE.
Catatan : Belum ada Rekomendasi Aplikasi dari KEMENPANRB tentang persetujuan pembangunan aplikasi khusus.
7. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan sudah terealisasi TW 1 2 aplikasi dan untuk TW III dan IV masing masing 1 aplikasi.
8. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet Pada TW 1 sudah tereliasasi sebanyak 112 Perangkat/UPT/Cabang Dinas

Catatan : Penyedia Akses Internet terletak di Mesjid Raya Palu Sulawesi Tengah

9. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

Catatan : Tidak Diambil

10. Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

Catatan : Masih Berlangsung Kegiatan Pada TW II

11. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

Catatan : Penambahan Infrastruktur Penunjang Pusat Kendali (Comic Center)

12. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Catatan : Penambahan Infrastruktur Penunjang pengelolaan Domain dan Sub Domain

Sub Kegiatan No Rekening ada didalamnya termaksud Satu Data (Statistik), adanya kerja sama antar Bidang Aptika dan Bidang Statistik.

NOTULEN

Hari/Tanggal: Terlampir : Kamis, 30 April 2026

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Diskominfo Provinsi Sulawesi Tengah

Agenda Rapat

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Realisasi Kinerja per Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2026.
2. Bukti Dukung (Output) Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran per Sub Kegiatan triwulan I Tahun 2026.
3. Rencana kerja masing-masing sub kegiatan per triwulan Tahun 2026.

Data Sektoral sebagai dasar pemenuhan indikator pada e-walidata Tahun 2026.

BIDANG STATISTIK

1. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
Catatan: Tidak dilaksanakan akibat adanya Efisiensi Anggaran tahun 2026
2. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional
Catatan: Tidak dilaksanakan akibat adanya Efisiensi Anggaran tahun 2026
3. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral
Catatan: Sub Kegiatan ini akan di Laksanakan pada TW II dan TW III
4. Pada Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
Catatan: Tidak dilaksanakan akibat adanya Efisiensi Anggaran tahun 2026
5. Pada Sub Kegiatan Peningkatan kualitas statistik sektoral
Catatan: Sub Kegiatan ini akan di Laksanakan pada TW II
6. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Catatan: Tidak dilaksanakan akibat adanya Efisiensi Anggaran tahun 2026

**PELAKSANAAN DESK RAKORTEK URUSAN KOMINFOSANTIK
KAB/KOTA TAHUN 2027**



PELAKSANAAN DESK ARSITEKTUR KINERJA TAHUN 2026



**PELAKSANAAN DESK MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL DKIPS
SERTA PENGUMPULAN BUKTI DUKUNG CAPAIAN REALISASI
KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2026**





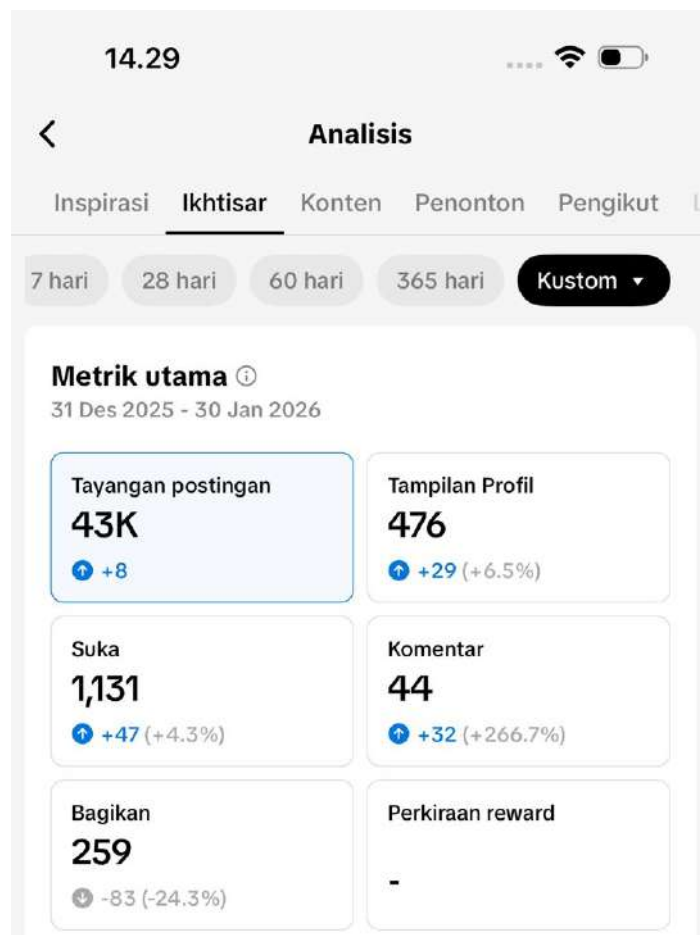
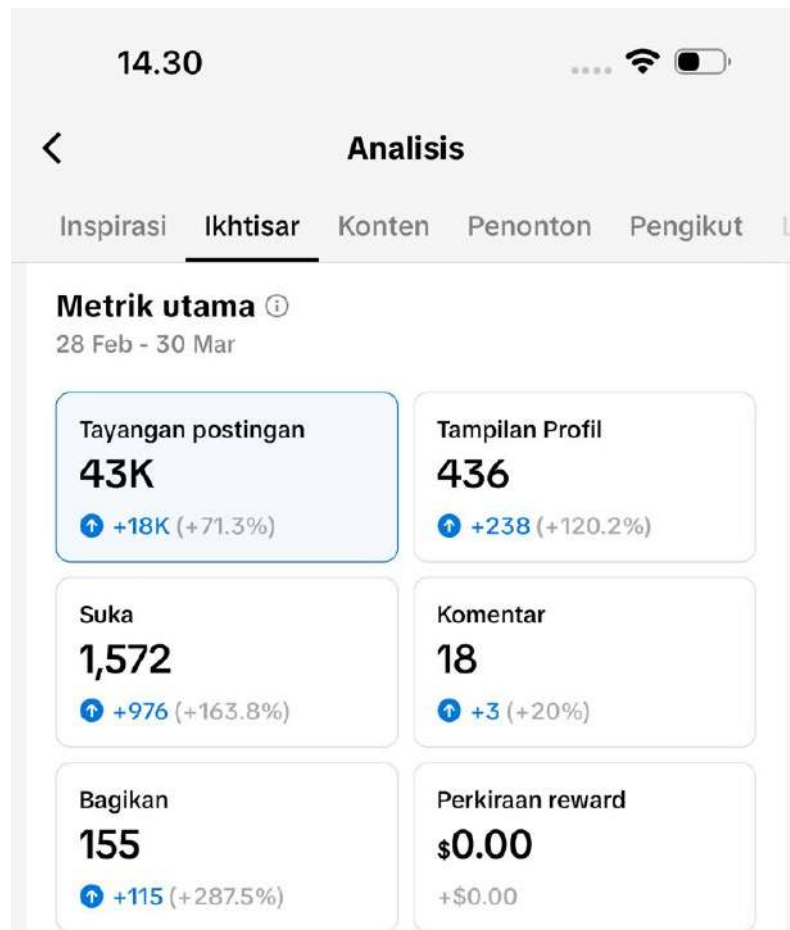
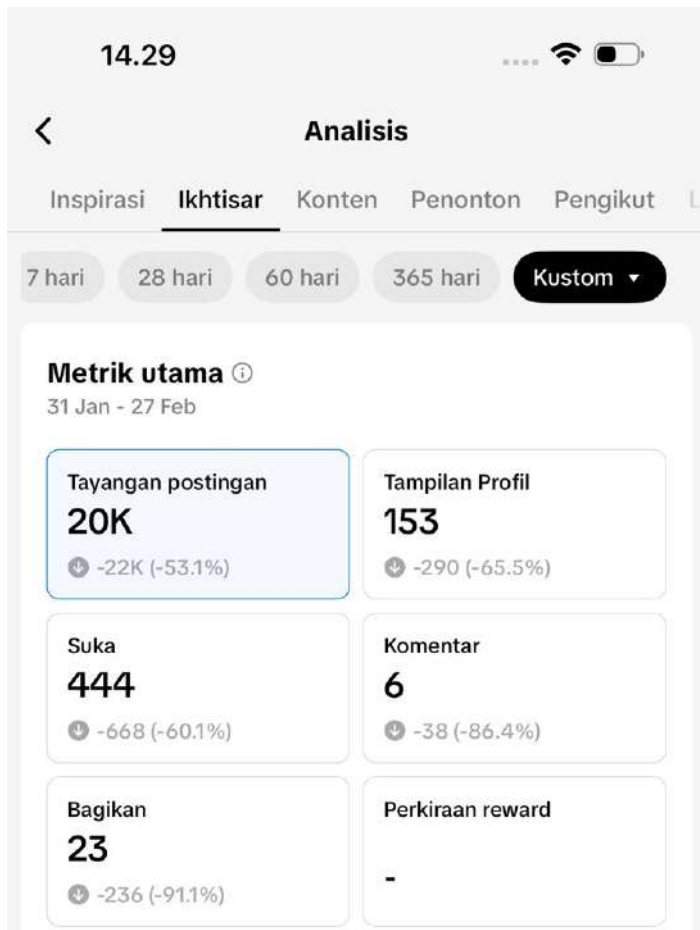
PEMENUHAN DOKUMEN PENDUKUNG PENILAIAN SAKIP DKIPS

TAHUN 2026



**HASIL SCREENSHOT PUBLIKASI KONTEN PROGRAM PRIORITAS
PEMERINTAH DAERAH PADA PLATFORM MEDSOS RESMI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Mendukung Capaian
Persentase Khalayak yang terpapar Informasi Kebijakan
Pemerintah Daerah**





**LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
TW I TAHUN 2026**

